

Peran PKS Menjadikan Masyarakat Lebih Beretika dan Bermoral Dalam Berpolitik

Husna Siregar¹, Abdi², M. Irfan Djailani³, Firman Alamsyah⁴, Udzri Hamdi⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

udzrihamdi34@gmail.com⁵

ABSTRACT

Democracy is a word that always fills the conversation of all levels of society, from the lower class to the elite class, namely community leaders, politicians, students, scholars, etc. In addition, democracy is believed to be an alternative value system that develops at the intersection of human life and society, even the state. Democracy is a school of philosophy, namely a school that studies the origins of political power in a country based on the general will of the people. In this case, the nation can be described as a rule of law that evokes the general will and animates the contents of democracy. Following the democratic system, power in the country is in the hands of the people themselves, basically democracy comes from the people, is governed by the people and benefits all the people. From an organizational point of view, democracy means the organization of the State which is carried out by the people themselves or with the consent of the people because sovereignty is in the hands of the people. Another opinion states that democracy is a political system which shows that public policies are determined on the basis of a majority by representatives who are effectively supervised by the people in periodic elections based on the principle of political equality and are held in an atmosphere of guaranteed political freedom.

Keywords : social justice party, society, ethics, morals, politics.

ABSTRAK

Demokrasi adalah kata yang selalu mengisi perbincangan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelas bawah hingga kelas elit, yaitu tokoh masyarakat, politikus, mahasiswa, ulama, dll. Selain itu, demokrasi diyakini sebagai sistem nilai alternatif yang berkembang di persimpangan kehidupan manusia dan masyarakat, bahkan negara. Demokrasi merupakan mazhab filsafat, yaitu mazhab yang mempelajari asal muasal kekuasaan politik di suatu negara berdasarkan kehendak umum rakyat. Dalam hal ini, bangsa dapat digambarkan sebagai negara hukum yang membangkitkan kehendak umum dan menjiwai isi demokrasi. Mengikuti sistem demokrasi, kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat itu sendiri, pada dasarnya demokrasi berasal dari rakyat, diperintah oleh rakyat dan menguntungkan seluruh rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pendapat lain menyebutkan bahwa, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas, prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik

Kata kunci : partai keadilan sejahtera, masyarakat, etika, moral, politik.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang besar, orang mungkin memiliki sedikit pengaruh sebagai individu, tetapi pengaruhnya bisa menjadi besar ketika mereka bergabung dalam suatu komunitas. Partai politik memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Keberadaan partai politik, yang merupakan bagian dari mekanisme penting

kehidupan demokrasi. Pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan ketika masyarakat dianggap apatis atau acuh tak acuh, selalu bergantung pada penguasa atau pemimpinnya, atau karena alasan bahwa masyarakat pada akhirnya hanya berfungsi sebagai objek dalam kehidupan politik penyelenggaraan negara. Jika demokrasi secara sederhana diartikan sebagai "dari rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat", maka partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik merupakan prasyarat. Karena jika tidak ada partisipasi manusia, tidak ada "rakyat dan rakyat". Namun, tidak mungkin melibatkan rakyat dalam proses politik publik, jika rakyat sangat apatis, acuh tak acuh, terpinggirkan, hanya sebagai penambah tatanan negara.¹

Secara umum, partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki nilai dan orientasi ideal yang sama. Golongan ini bertujuan untuk mencapai kekuasaan dan otoritas politik, posisi politik biasanya dibentuk secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya. Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kekuasaan bagi PKS bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk melindungi keadilan dan kemaslahatan bagi sesama manusia dan semua golongan, untuk mencapai hak dan kewajiban warga negara secara bermartabat. Di Indonesia, PKS sering disebut sebagai keajaiban politik. Bayangkan, hanya sekitar setahun setelah deklarasi (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan itu berhasil mengikuti pemilu 1999. Pada pemilu 2004-2009, PKS berhasil mendongkrak perolehan suara yang sangat signifikan. Sebuah partai yang berganti nama menjadi Blooming Justice Party karena ambang pemilihan. Peristiwa inilah yang menggugah rasa ingin tahu penulis untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut, mengkaji peran partai Úitsengu Erakonna (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat.²

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan seseorang, lembaga, atau masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan atau langkah antisipasi yang diambil para aktivis dakwah yang ada di Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan

¹ Khamami Zada dan Arif Arafah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP, 2004), cet. Ke-1 h. 24

² Matori Abdul Jalil, "Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi", *Dalam Agama dan Demokrasi*. (Jakarta: P3M, 1994), cet. Ke-2, h.122.

³ *Metedologi Penelitian Sosial, Terapan dan Kebijaksanaan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000), h. .39

kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai.⁴

Perolehan pemilu pada tahun 1999 yang dibawah electoral therashold membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama "Partai Keadilan Sejahtera" (PKS) yang diharapkan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan. Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.

Partai ini berlambangkan dua bulan berwarna kuning emas, dengan garis lurus diantara kedua bulan sabit, yang juga berwarna kuning emas. Bulan sabit dan garis lurus tersebut berada dalam suatu kotak berwarna hitam dan dibawahnya terdapat tulisan "SEJAHTERA". Diatas kotak hitam ada sebuah persegi panjang yang panjangnya sama dengan kotak dibawahnya, tetapi dengan ketinggian yang lebih pendek didalamnya tertulis "PARTAI KEADILAN" dengan tulisan berwarna kuning emas. Secara keseluruhan kotak dan persegi panjang itu mensimbolkan Ka'bah, kiblat suci kaum muslimin yang melambangkan kesatuan umat. Partai ini memiliki karekteristik moralis, professional, patriotik demokrat, reformasi dan independen. Sedangkan prinsip dasar dari PKS adalah keadilan, persamaan dan keseimbangan, kesatuan nasional, kemajuan, khidmatul ummah demi persatuan dan kerjasama Internasional.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, karena hak rakyat untuk menentukan politiknya sendiri masih terjamin, demokrasi merupakan istilah politik yang paling populer dan sering digunakan oleh banyak negara, termasuk negara-negara Islam. Di dalam dunia Namun, para ahli ilmu politik tidak sependapat apakah demokrasi hanyalah alat atau tujuan itu sendiri atau tujuan itu sendiri.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani untuk pemerintahan rakyat dan terbagi menjadi dua kata yaitu "demos" dan "cratos" demos artinya rakyat dan Kratos artinya kekuasaan. Yang juga berarti bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, dan juga berarti bahwa dalam pemerintahan, seorang individu dan individu lainnya memiliki hak yang sama secara politik, sama-sama berdaulat.⁵

Dari segi terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai suatu gagasan atau sikap hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Hampir semua

⁴ Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 161.

⁵ Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 8.

pemerintahan di dunia kini telah menerima istilah demokrasi. Bahkan rezim otoriter menggunakan istilah "demokrasi" untuk menggambarkan rezim dan aspirasi mereka.

Hubungan Antara Etika dan Moral

Moralitas adalah nilai mutlak dalam semua kehidupan sosial. Penilaian akhlak diukur dengan budaya masyarakat setempat, akhlak adalah perbuatan/perilaku/ucapan, akhlak berasal dari kata *mos* yang berarti kebiasaan. Kata "lebih", yang berarti kemurnian, dari "*mos*", "lebih". Moralitas adalah doktrin baik dan jahat, yang diterima secara universal mengenai tindakan, sikap, tugas dan masalah moral lainnya; dan kesopanan. Moralitas adalah seperangkat norma, nilai dan sikap seseorang atau sekelompok orang, yang dinyatakan dalam tingkah laku lahiriah, yang mengungkapkan isi hatinya, karena ia sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Ada hubungan yang sangat erat antara etika dan moralitas karena etika dan moralitas mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan antara etika dan moralitas, sehingga ukuran moralitas adalah mengukur tingkah laku seseorang yaitu tata krama, adat istiadat dan hal-hal lain yang berlaku dalam masyarakat. Etika dan moralitas pada dasarnya memiliki arti yang sama, namun terdapat sedikit perbedaan dalam penggunaan sehari-hari. Moralitas digunakan untuk tindakan yang bernilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada.

Peran PKS Menjadikan Masyarakat dalam Beretika dan Bermoral dalam Demokrasi

Strategi PKS sebagai partai dakwah (*khuthuth'aridhah*) dalam mengubah bangsa adalah gerakan kebudayaan (Strategi Mobilisasi Horizontal/*ta'biah al-afaqiyah*) dan gerakan struktural (Strategi Mobilitas Vertikal/*ta'biah al-amudiyah*). Mobilisasi horizontal adalah pengiriman kader dakwah ke berbagai kelompok dan lapisan masyarakat untuk mempersiapkan masyarakat menerima produk manhaj Islam dan politik Islam. Mobilisasi vertikal adalah pengerahan kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi *mashdirul qarar* (pusat politik) agar mampu menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik.

PKS menyebut dirinya partai dakwah karena politik adalah bagian dari dakwah, meskipun dakwah Islam dapat didiversifikasi ke dalam kegiatan politik, yang dilakukan para aktivis di kampus dakwah yang melahirkan PKS. Tentu PKS juga ingin dilihat sebagai eksperimen, karena dengan pandangan bahwa politik adalah bagian dari dakwah Islam, maka PKS tidak bisa disebut sebagai pemula.⁶

Gerakan budaya (Strategi Mobilisasi Horizontal) dilakukan dengan mengirimkan kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam transformasinya sendiri. Dalam gerakan budaya ini, para kader, baik secara individu maupun melalui lembaga sosial, yayasan, ormas dan berbagai organisasi lainnya, bergerak di bidang kemaritiman, penyuluhan dan

⁶ DPP PKS, *Sekilas Partai Keadilan*, h. 25-26

perbaikan masyarakat dari bawah ke atas. Kader PKS bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, kependudukan, perempuan, kemiskinan, dll. Oleh karena itu, kader yang profesional sangat dibutuhkan dan harus dibudayakan di berbagai bidang kehidupan untuk terus bermasyarakat. Menyadari gerakan budaya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebarkan kader dakwah ke berbagai daerah dan simpul kepemimpinan serta kantong budaya masyarakat, sehingga terbentuk garis massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang dibangun merupakan bentuk kepercayaan atau amanah yang diberikan masyarakat kepada pihak dakwah untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Gerakan struktural adalah penyebarluasan kader di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sektor-sektor dalam pelayanan, pembangunan, dan penyelenggaraan negara melalui mekanisme konstitusional seperti partisipasi partai politik dalam pemilu dan peningkatan profesionalisasi kader. Misinya adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan sistem, manajemen struktural dan top-down kebijakan publik, peraturan dan perundang-undangan dalam konteks perubahan sosial. Gerakan struktural ini sekaligus ikut serta dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan negara. Jika PKS melakukan gerakan struktural berdasarkan falsafah atau platform yang sama, maka dimungkinkan untuk membangun strategi kemitraan antara partai dan lembaga dakwah serta tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan untuk membentuk politik sedemikian rupa sehingga membangun lapisan pemikiran yang menjustifikasi kebijakan yang melindungi negara.⁷

Strategi besar PKS, transformasi bangsa, tak lebih dari gabungan perubahan bottom-up dan bottom-up, yang menjadi ciri khas PKS sebagai partai dakwah. Strategi besar PKS untuk transformasi bangsa adalah gerakan menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat (sektor publik, swasta dan LSM/sektor lainnya) berbasis kader berbagai profesi dan profesi yang berintegritas moral agama dan kualitas profesional. Sebagai partai dakwah, PKS bertujuan untuk mengoptimalkan kader dari berbagai bidang untuk mengembangkan, mendukung dan memperkuat gerakan kultural dan struktural untuk transformasi bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada Dewan Perwakilan Cabang PKS Medan Deli.

DAFTAR PUSTAKA

Aay Muhammad Furqon. Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju 2004).

⁷DPP PKS Sekilas Partai Keadilan, h 40-46

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 94-99 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.264

David Betham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Khamami Zada dan Arif Arafah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP, 2004),

Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999).

Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*.

Matori Abdul Jalil, "Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi", Dalam *Agama dan Demokrasi*. (Jakarta: P3M, 1994).

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)

MPP PKS, *Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: MPP PKS, 2000).

Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).

Zaenal Muthaqiní, "Doktrin Demokrasi Amerika Relevansinya Terhadap Hukum Islami", (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2006)